



KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN
SCAN BARCODE



JUMAT LEGI

18 AGUSTUS 2023 (30 SURTA 1957 / TAHUN LXXVIII NO 307)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

Pemda DIY Buka Lowongan CASN PPPK

YOGYA (KR) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY membuka rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di lingkungan Pemda DIY pada September mendatang. Kuota lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1.042 orang. Dari jumlah tersebut paling banyak untuk formasi guru sebanyak 826, tenaga kesehatan 106, dan teknis berjumlah 110.

"Saat ini sejumlah persiapan berkaitan dengan proses seleksi terus kami lakukan. Hal itu sengaja dilakukan sejak awal dengan harapan tahapan seleksi bisa dilakukan secara baik dan optimal. Rekrutmen dimulai minggu ketiga bulan September 2023 sampai dengan Maret 2024," kata Kepala BKD DIY Amin Purwani di Kompleks Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Kamis (17/8). * Bersambung hal 7 kol 1



Penyanyi Putri Ariani tampil saat Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8/2023).

Analisis Ekonomi Sirkular

Dr Y Sri Susilo



PENUTUPAN TPA Piyungan menjadikan depo-depo penampungan sampah di Kota Yogyakarta sementara ditutup. Akibatnya sampah menggenangi di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS). Di banyak tempat tampak sampah menggenangi di pinggir jalan. Akibatnya, banyak alat dan tercium bau tak sedap. * Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:46	15:06	17:42	18:52	04:30

Jumat, 18 Agustus 2023 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

PROMO SPESIAL KEMERDEKAAN

Yuk Intip Si Kecil
dengan Pemeriksaan USG 4D

Facilitas:
- Konsultasi Dokter Spesialis Obgyn
- USG 4D
- Print dan Soft File Hasil USG

Informasi & Pendaftaran:
☎ 0811 8550 060

Rp 235.000

78 Tahun Indonesia Lalui Rupa-rupa Cobaan Hadapi Tantangan Baru dengan Gotong Royong

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo memimpin Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi pada Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8).

Presiden yang mengenakan baju daerah Ageman Songkok Singkepan

Ageng dari Surakarta, Jawa Tengah, bertindak selaku Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI yang mengusung tema 'Terus Melaju untuk Indonesia Maju'. Tema ini menyiratkan ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk melaju bersama melanjutkan pembangunan dengan menggelo-

rakan semangat berkolaborasi dan bersinergi.

Bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Arm Joko Setiyo Kurniawan, Danmen Armed 2/PY/2 Kostrad. Sebelum upacara, dilakukakan Kirab Bendera Merah Putih dan Naskah Proklamasi dari

* Bersambung hal 7 kol 5

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● SABTU 20 Mei 2023 tengah malam, cucuku umur 4 tahun terbangun mencari tantenya yang ada di Bogor Jawa Barat. la ngotot bahwa tantenya pulang dan barusan membelikan mobil-mobilan. Mungkin cucuku bermimpi. (Bekti Subagyo, Sumberjo RT 26 RW 04 Ngawu, Ngawen Gunungkidul 55861)-f

ANGKA KEMISKINAN DIY TERUS JADI PEMBICARAAN DPRD DIY : Maksimalkan Serapan Danais untuk Entaskan Kemiskinan



FORUM DPRD DIY

TINGGINYA angka kemiskinan di DIY sering menjadi pembicaraan dalam berbagai diskusi yang terkait kerakyatan. Bahkan di tataran media sosial, kemiskinan di DIY kerap menjadi kata mengawali konten jika menyinggung tentang keistimewaan DIY.

Terkait hal ini menjadi perhatian DPRD DIY sebagai lembaga legislatif. Ketua DPRD DIY Nuryadi SPD mengungkapkan, angka kemiskinan DIY berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 mencapai angka 11,5 persen menjadi ironis jika DIY dengan Undang-Undang Keistimewaan mendapatkan Dana Keistimewaan (danais) yang menyentuh angka Rp 1,42 triliun pertahun (2023).

Karena itu, kata Nuryadi, seluruh fraksi di DPRD sepakat bahwa kemiskinan menjadi pekerjaan rumah (PR) utama yang harus segera diselesaikan. Langkah nyata bisa dilakukan, di antaranya memaksimalkan serapan Danais yang didapatkan dari Pemerintah Pusat. "Keistimewaan kita harus bisa menjadi faktor pengentasan kemiskinan," tegas Nuryadi.

Sehingga, baik DPRD DIY maupun Pemda DIY bersinergi untuk bersama-sama berupaya terus mengentaskan kemiskinan, termasuk dengan memanfaatkan instrumen Danais. Terkait mekanisme untuk



Ketua DPRD DIY Nuryadi SPD

KR-Istimewa

merealisisasikan Danais untuk pengentasan kemiskinan, sebetulnya bisa diupayakan dengan kemauan bersama. "Perkara aturan bisa kita komunikasikan ke pusat, sangat bisa," sambungnya. Menurut legislator PDI Perjuangan ini, pengupayaan peningkatan penggunaan Danais, menjadi salah satu jalan untuk pengentasan kemiskinan di sejumlah tempat di DIY. Bentuk lainnya bisa bersumber dari pos APBN lainnya serta APBD DIY. Namun peruntukannya harus diatur dengan sebaik dan sedetail mungkin karena budaya yang ada di masyarakat DIY sedikit berbeda.

Sejauh ini, kata Nuryadi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan perhatian terkait persoalan angka kemiskinan, sehingga terus membuka pembahasan mengenai persoalan pengentasan kemiskinan dengan DPRD DIY. Mengingat hal tersebut terkait dengan persoalan kesejahteraan

15 LOKUS KAPANEWON KEMISKINAN DI DIY

KAB/KOTA	KAPANEWON	INDIVIDU	KELUARGA
KULONPROGO	SENTOLO	31.949	11.373
KULONPROGO	PENGASIH	31.647	11.634
KULONPROGO	KOKAP	24.792	9.294
KULONPROGO	SAMIGALUH	20.196	7.577
BANTUL	IMOGIRI	42.957	16.381
GUNUNGKIDUL	NGLIPAR	28.155	10.071
GUNUNGKIDUL	PLAYEN	42.300	16.074
GUNUNGKIDUL	TEPUS	31.271	10.923
GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	40.406	15.675
GUNUNGKIDUL	PONJONG	44.562	16.443
GUNUNGKIDUL	GEDANGSARI	35.713	13.092
GUNUNGKIDUL	SAPTOSARI	34.896	12.242
SLEMAN	SEYEGAN	35.491	13.193
SLEMAN	PRAMBANAN	34.681	13.325
SLEMAN	TEMPEL	36.336	13.653

Sumber: Dinas Sosial DIY

rakyat. Nuryadi memastikan semua fraksi di DPRD DIY menghendaki kemiskinan segera selesai, dengan angka semakin hari semakin turun. Dengan kewenangan yang dimiliki, baik legislasi, budgeting (ang-

garan) maupun pengawasan (controlling). Dari kewenangan legislasi, telah menghasilkan peraturan daerah (perda) yang mendukung pengentasan kemiskinan, seperti Perda DIY No 11 Tahun 2019



tentang Penanggulangan Kemiskinan. Harapannya Perda ini menjadi pegangan bagi eksekutif bersama masyarakat dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan.

Dari kewenangan budgeting, memberikan dukungan dalam alokasi anggaran terkait penanggulangan kemiskinan dalam APBD DIY. Termasuk di antaranya intervensi penanganan kemiskinan melalui bansos yang berasal dari APBD DIY.

Sedangkan aspek pengawasan salah satunya agar distribusi bantuan, bisa sesuai sasaran. Karena itu, soal pendataan penduduk miskin menjadi penting, agar bantuan yang diberikan sesuai dengan yang membutuhkan.

Di samping itu melakukan pengawasan sejauh mana program yang sudah disampaikan ke DPRD DIY sudah berjalan dengan baik. Karena program tersebut, juga terkait sejauh mana dampak dari distribusi anggaran pengentasan kemiskinan.

Para anggota dari setiap fraksi di DPRD DIY, dalam kunjungan ke daerah pilihannya, tentunya memperhatikan kondisi masyarakat yang ada di daerahnya. Termasuk memberikan perhatian masyarakat tidak mampu.

Terkait pengucuran

bantuan sosial ke keluarga miskin, tak dipungkiri hasilnya berbeda dari harapan. Hal itu karena terbentur budaya. Dimana budaya warga DIY di pedesaan memiliki perilaku tidak konsumtif. Sehingga bantuan yang diberikan tidak dibelanjakan. Tetapi malah disimpan.

"Sultan sudah statement bagi masyarakat miskin ekstrem kita siap bantu anggaran. Tapi dengan petunjuk pelaksanaan. Namun akan sama saja jika tak dibelanjakan warga yang menerima bantuan," ujar Nuryadi.

Nuryadi yang berasal dari Dapil Gunungkidul ini melihat kecenderungan tersebut. "Petani bahkan memilih untuk memberi makan hewan ternaknya. Untuk nyangoni anak cucunya juga. Ini tidak buruk. Agar bantuan dibelanjakan, maka perlu pendekatan," ujarnya.

Kenapa bantuan pemerintah perlu dibelanjakan, karena dalam indikator kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melihat angka konsumsi. Meski memiliki ternak, anak sekolah dengan baik, namun angka konsumsinya rendah, maka bisa masuk kategori miskin.

Dua kabupaten di DIY yakni Gunungkidul dan Kulonprogo masih menjadi wilayah termiskin berdasar data BPS tersebut. Di dua wilayah itu, masyarakat memiliki kebiasaan hidup sederhana dan bertani. Dimana mereka memiliki budaya tidak konsumtif.

Pendapatan yang diperoleh untuk membeli ternak, atau untuk keperluan pendidikan anaknya.

Nuryadi mengakui bahwa bahwa kantong kemiskinan banyak terdapat di Gunungkidul dan juga Kulonprogo. Di sisi lain, terdapat potensi ekonomi di pedesaan, baik berupa wisata hingga pertanian. Karena itu harapannya kepada Pemda DIY dan Kabupaten terdapat yang terdapat kantong kemiskinan, untuk menangkap potensi tersebut dengan dukungan infrastruktur yang lebih memadai. Misal jalan memadai dan sarana irigasi yang lebih baik.

Tak dapat dipungkiri, tidak mudah mengubah budaya masyarakat di pedesaan untuk konsumtif, sehingga angka konsumsinya bisa melewati batas indikator 'miskin' yang ditentukan BPS. Namun budaya warga DIY yang sudah menabung, lebih memilih uangnya untuk pendidikan telah menghantarkan angka harapan hidup, angka kebahagiaan, angka rata-rata sekolah, indeks kesejahteraan, Indeks Pembangunan Manusia justru meningkat. Sehingga tingkat kemiskinan di DIY adalah anomaly, atau kontradiksi kemiskinan.

Data Bappeda DIY tahun 2010 hingga 2022 IPM di DIY bertambah 5,37 poin, dari 75,37 pada tahun 2010 menjadi 80,64 pada tahun 2022. Sebagai contoh Kulonprogo kemiskinannya mendekati 18 persen tapi

* Bersambung hal 7 kol 5



YouTube Kedaulatan Rakyat TV

Simak juga wawancara di :

krjogja.com



krjogja.com



Kedaulatan Rakyat @Krdotcom



KedaulatanRakyat Kedaulatan rakyat Media